



Kontradiksi Gereja GKII dan Adat Kematian: Implikasi terhadap Kehidupan Sosial dan Budaya Jemaat (Desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba)

Vivi Angelin Hutabarat¹, Wensdy Sitindaon², Maringan Sinambela³, Roida Lumbantobing⁴, Masniar H Sitorus⁵

¹Mahasiswa, Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Kristen, IAKN Tarutung

^{2,3,4,5}Dosen, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Kristen, IAKN Tarutung

*correspondence: angelinvivi881@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontradiksi antara pemahaman keagamaan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan praktik adat kematian Batak Toba serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan budaya jemaat di Desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan pimpinan gereja, pengurus gereja, tokoh adat, jemaat, pemuda, dan masyarakat sebagai informan. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi terutama terjadi pada penggunaan Gondang Sabangunan, tradisi *mangulosi*, dan praktik penghormatan terhadap jenazah. Perbedaan tersebut tidak semata-mata menunjukkan pertentangan antara agama dan budaya, tetapi terutama bersumber dari perbedaan interpretasi terhadap makna spiritual dan kultural simbol adat. Kontradiksi tersebut menimbulkan dilema loyalitas antara kepatuhan terhadap ajaran gereja dan kewajiban kekerabatan, memengaruhi partisipasi dalam aktivitas komunal, serta berpotensi melemahkan transmisi pengetahuan adat kepada generasi berikutnya. Namun, penelitian juga menemukan proses adaptasi melalui reinterpretasi simbol dan substitusi sejumlah praktik adat dengan bentuk yang dianggap sesuai dengan keyakinan Kristen. Temuan penelitian menunjukkan pola kontradiksi-negosiasi-reinterpretasi, yang memperlihatkan bahwa hubungan iman dan budaya bersifat dinamis. Dialog antara gereja, tokoh adat, dan jemaat diperlukan untuk mempertahankan integritas iman sekaligus menjaga identitas budaya, hubungan kekerabatan, dan solidaritas sosial masyarakat Batak Toba.

Kata Kunci: adat kematian, Batak Toba, GKII, negosiasi budaya, solidaritas sosial.

PENDAHULUAN

Agama dan kebudayaan merupakan dua sistem makna yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Agama menyediakan kerangka keyakinan mengenai yang sakral, kehidupan, kematian, dan keselamatan, sedangkan kebudayaan menyediakan simbol, praktik, serta struktur sosial yang memungkinkan individu membangun dan mempertahankan identitas kolektif. Geertz (1973) memandang agama sebagai sistem simbol yang membentuk suasana hati, motivasi, dan konsepsi manusia mengenai tatanan eksistensi. Sementara itu, Berger (1967) menunjukkan bahwa agama berperan dalam membangun dunia makna yang memberikan legitimasi terhadap realitas sosial. Karena agama dan kebudayaan sama-sama menghasilkan sistem makna, perjumpaan keduanya dapat menghasilkan integrasi, negosiasi, reinterpretasi, tetapi juga ketegangan ketika suatu praktik budaya dinilai tidak sejalan dengan keyakinan keagamaan. Dinamika tersebut terlihat kuat dalam masyarakat Batak Toba, yang memiliki sistem adat dan kekerabatan dengan posisi penting dalam kehidupan sosial. Adat tidak hanya hadir dalam bentuk seremoni, tetapi berfungsi sebagai mekanisme yang mengatur relasi sosial sejak kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Salah satu fondasinya adalah *Dalihan Na Tolu*, yang mengatur hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Dalam konteks kematian, sistem tersebut memperoleh ekspresi melalui pembagian peran, pemberian ulos, musik, tortor, komunikasi adat, serta berbagai simbol yang menegaskan kembali posisi seseorang dalam jaringan kekerabatan. Karena itu, upacara kematian tidak semata-mata merupakan respons terhadap berakhirnya kehidupan biologis, tetapi juga menjadi ruang reproduksi solidaritas, identitas, dan memori kolektif. Penelitian mengenai ritual kematian Batak Toba menunjukkan bahwa perubahan sosial dan agama turut menghasilkan transformasi terhadap bentuk maupun pemaknaan sejumlah praktik adat (Firmando, 2020; Hutagaol & Prayitno, 2019; Simbolon & Limbong, 2021).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika praktik budaya tersebut berhadapan dengan penafsiran teologis Kristen yang memberikan batas tertentu terhadap keterlibatan umat dalam ritual tradisional. Kekristenan sendiri tidak pernah hadir dalam ruang budaya yang kosong. Hefner (1993) menunjukkan bahwa konversi agama merupakan transformasi yang dapat mengubah cara individu dan komunitas memahami dunia, otoritas, serta identitas sosial. Dalam konteks teologi, Niebuhr (1951) memperlihatkan adanya beragam pola hubungan antara Kristus dan kebudayaan, mulai dari penolakan terhadap budaya hingga transformasi budaya. Bevans (2002) kemudian menegaskan pentingnya teologi kontekstual yang mempertemukan iman dengan pengalaman, budaya, lokasi sosial, dan perubahan masyarakat. Dengan demikian, persoalan gereja dan adat tidak memadai apabila direduksi menjadi pilihan sederhana antara menerima atau menolak kebudayaan. Ketegangan tersebut menjadi semakin menarik dalam konteks gereja bercorak Pentakostal/Karismatik. Tradisi Pentakostal memiliki penekanan kuat pada pengalaman Roh Kudus, pertobatan personal, otoritas Kitab Suci, dan transformasi kehidupan (Anderson, 2004; Hollenweger, 1997). Dalam berbagai konteks masyarakat, ekspansi Kekristenan Pentakostal juga dapat menghasilkan proses negosiasi baru terhadap praktik-praktik budaya lokal (Robbins, 2004). Karena itu, respons suatu komunitas gereja terhadap adat tidak semata-mata merupakan persoalan ritual, tetapi dapat berhubungan dengan pembentukan batas identitas keagamaan: praktik apa yang dipandang

kompatibel dengan iman Kristen dan praktik apa yang dipersepsikan mengandung makna spiritual yang tidak dapat diterima.

Fenomena tersebut ditemukan pada jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) di Desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Berdasarkan data penelitian, kontradiksi terutama muncul dalam interpretasi terhadap beberapa unsur ritual kematian Batak Toba, termasuk penggunaan Gondang Sabangunan, pemberian ulos tertentu, dan praktik penghormatan terhadap jenazah. Pihak gereja menerima unsur budaya yang dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, tetapi membatasi atau menolak praktik yang ditafsirkan mengandung komunikasi dengan roh leluhur atau atribusi kekuatan spiritual di luar keyakinan Kristen. Sebaliknya, dari perspektif tokoh adat, praktik-praktik tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari penghormatan, ikatan kekerabatan, dan pelaksanaan Dalihan Na Tolu. Perbedaan interpretasi inilah yang menjadi titik penting kontradiksi: simbol yang sama dapat memperoleh makna teologis dan kultural yang berbeda.

Kontradiksi tersebut memiliki konsekuensi yang melampaui perdebatan doktrinal. Data penelitian menunjukkan adanya dilema loyalitas, terutama ketika jemaat harus menegosiasikan kepatuhan terhadap ajaran gereja dengan kewajiban sebagai anggota keluarga dan marga. Ketegangan tersebut dapat berimplikasi pada hubungan antargenerasi, partisipasi dalam aktivitas komunal, praktik *marsiadapari*, serta munculnya jarak sosial antara sebagian jemaat dan komunitas adat. Pada saat yang sama, penelitian menemukan adanya proses adaptasi: beberapa simbol budaya tidak sepenuhnya dihilangkan, melainkan mengalami reinterpretasi agar dapat diterima dalam kerangka iman Kristen. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi agama dan budaya lebih tepat dipahami sebagai arena kontestasi sekaligus negosiasi makna.

Kajian terdahulu telah membahas perubahan ritual kematian Batak Toba (Firmando, 2020), perkembangan *Mangongkal Holi* dalam Kekristenan (Hutagaol & Prayitno, 2019), perawatan setelah kematian dalam budaya Batak Toba (Simbolon & Limbong, 2021), makna Ulos Saput dalam upacara kematian (Sinulingga et al., 2023), serta komunikasi musikal dalam upacara kematian Batak Toba (Simangunsong et al., 2024). Namun, ruang penelitian masih terbuka untuk menganalisis bagaimana otoritas keagamaan, otoritas adat, dan solidaritas sosial berinteraksi ketika terjadi perbedaan interpretasi terhadap ritual kematian pada komunitas gereja tertentu. Naskah asli juga mengidentifikasi keterbatasan kajian yang secara khusus membahas GKII dalam konteks lokal Desa Parparean. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kontradiksi antara pemahaman keagamaan GKII dan praktik adat kematian Batak Toba serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan budaya jemaat di Desa Parparean. Analisis menggunakan konsep otoritas karismatik Weber (1947) untuk membaca relasi otoritas keagamaan dan tradisional serta pemikiran Durkheim (1912) mengenai agama, sakralitas, dan solidaritas untuk memahami perubahan kohesi sosial. Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan kontradiksi bukan sekadar sebagai benturan “agama versus budaya,” melainkan sebagai negosiasi tiga ranah sekaligus: otoritas, interpretasi simbol, dan solidaritas sosial. Dengan perspektif tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih proporsional mengenai bagaimana komunitas Kristen Batak Toba

mempertahankan keyakinan keagamaan sekaligus menegosiasikan keterikatannya dengan identitas kultural dan struktur kekerabatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam kontradiksi antara pemahaman keagamaan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan praktik adat kematian Batak Toba, termasuk makna yang diberikan oleh pendeta, jemaat, tokoh adat, dan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Penelitian kualitatif memungkinkan realitas sosial dipahami berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interpretasi para aktor yang terlibat secara langsung (Moleong, 2021). Dengan demikian, penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk mengidentifikasi bentuk kontradiksi serta menganalisis implikasinya terhadap kehidupan sosial dan budaya jemaat. Penelitian dilaksanakan pada Maret-Juni 2026 di Desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan fokus pada komunitas jemaat GKII Parparean. Lokasi ditentukan secara purposif karena masyarakat Parparean berada pada persinggungan antara kuatnya tradisi Batak Toba dan keberadaan komunitas GKII yang memiliki batas-batas teologis tertentu dalam merespons praktik adat. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Informan kunci terdiri atas pendeta/gembala GKII Parparean, pengurus atau majelis gereja, dan tokoh adat/*Raja Parhata*. Informan pendukung meliputi jemaat aktif, pemuda gereja, serta anggota masyarakat adat Desa Parparean. Observasi dilakukan dengan mengamati prosesi pemakaman atau kegiatan penghiburan gerejawi, pola kehidupan jemaat, serta dinamika interaksi sosial masyarakat tanpa mengintervensi aktivitas yang berlangsung. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menggali pemaknaan teologis dan kultural, pengalaman jemaat, serta argumentasi pemimpin gereja dan tokoh adat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip gereja, dokumentasi kegiatan ritual, dan dokumen pendukung mengenai kondisi masyarakat. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema utama, terutama bentuk kontradiksi ritual, otoritas gereja dan adat, dilema loyalitas, perubahan hubungan sosial, dan adaptasi budaya. Analisis selanjutnya menggunakan perspektif otoritas Weber dan solidaritas sosial Durkheim sebagai perangkat interpretatif untuk memahami hubungan antara otoritas keagamaan, otoritas adat, dan perubahan kohesi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi antara GKII Parparean dan adat kematian Batak Toba tidak terutama terletak pada penolakan terhadap kebudayaan Batak secara keseluruhan. Persoalan utama justru berada pada perbedaan interpretasi terhadap makna spiritual sejumlah simbol dan praktik ritual kematian. GKII menerima unsur budaya yang dinilai tidak bertentangan dengan Alkitab, tetapi membatasi atau menolak praktik yang ditafsirkan mengandung komunikasi dengan roh leluhur, permohonan berkat kepada orang yang telah meninggal, atau atribusi kekuatan spiritual

pada objek tertentu. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa relasi agama dan budaya di Parparean tidak tepat dibaca melalui oposisi sederhana “Kristen versus Batak.” Jemaat GKII sendiri hidup dalam struktur sosial Batak Toba dan tetap menjadi bagian dari keluarga, marga, serta komunitas adat. Kontradiksi muncul ketika suatu simbol memperoleh dua rezim pemaknaan: makna kultural menurut komunitas adat dan makna teologis menurut otoritas gereja. Kondisi demikian sejalan dengan pemikiran Geertz (1973) bahwa simbol memperoleh kekuatan sosial melalui sistem makna yang melingkupinya. Karena itu, benda atau tindakan yang sama dapat ditafsirkan secara berbeda oleh dua komunitas interpretatif. Data penelitian mengidentifikasi tiga wilayah utama kontradiksi, yaitu Gondang Sabangunan, tradisi mangulosi, dan ritual penghormatan terhadap jenazah.

Tabel 1. Pemetaan Kontradiksi GKII dan Adat Kematian Batak Toba

Unsur Ritual	Pemaknaan/Praktik Adat dalam Data Penelitian	Sikap GKII dalam Data Penelitian	Titik Kontradiksi
Gondang Sabangunan	Digunakan dalam ritual kematian dan sebagai ekspresi duka/sukacita, termasuk pada <i>Saur Matua</i>	Gondang tradisional dibatasi/ditolak dan digantikan musik atau lagu pujian	Perbedaan interpretasi terhadap dimensi spiritual Gondang
Mangulosi	Ulos Holong dipahami sebagai simbol pemberkatan, perlindungan, dan ikatan kasih kekerabatan	Ulos yang dipersepsikan memiliki tuah spiritual ditolak; penggunaan dibatasi pada fungsi simbolis/fisik	Perbedaan makna sakralitas ulos
Penghormatan jenazah	Data penelitian mencatat <i>piring sai</i> dan <i>minta tua</i> sebagai bagian praktik yang dipersoalkan	Komunikasi, doa, atau permohonan berkat kepada orang meninggal ditolak	Perbedaan teologi mengenai relasi orang hidup dan orang meninggal

Sumber: diadaptasi dari hasil penelitian, 2026

Gondang Sabangunan: Musik sebagai Arena Kontestasi Makna

Kontradiksi pertama berkaitan dengan *Gondang Sabangunan*. Dalam data penelitian, praktik adat menempatkan gondang dalam rangkaian ritual kematian dan ekspresi komunal, sedangkan pihak GKII menafsirkan penggunaan tertentu sebagai praktik yang berpotensi berhubungan dengan pemanggilan roh. Karena alasan tersebut, instrumen gondang tradisional dalam konteks ritual tertentu digantikan dengan musik atau lagu pujian gerejawi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa konflik sebenarnya bukan

semata-mata mengenai instrumen musik, tetapi mengenai makna yang dilekatkan padanya. Bagi otoritas gereja dalam data penelitian, persoalannya terletak pada asosiasi spiritual yang dipersepsikan berada di balik penggunaan gondang. Sebaliknya, tokoh adat menekankan fungsi ritual sebagai bagian dari penghormatan dan pelaksanaan struktur kekerabatan.

Temuan ini sejalan dengan argumentasi Niebuhr (1951) bahwa hubungan antara iman Kristen dan kebudayaan dapat mengambil berbagai posisi. Pada satu sisi terdapat kecenderungan memisahkan iman dari unsur budaya yang dianggap bertentangan dengan keyakinan; pada sisi lain terdapat kemungkinan transformasi ketika unsur budaya diberikan pemaknaan baru. Dalam kasus Parparean, kedua pola tersebut muncul secara bersamaan: penggunaan tertentu dari gondang ditolak, tetapi kebutuhan musikal dalam upacara tidak dihilangkan dan digantikan dengan musik Kristen. Di sinilah konsep teologi kontekstual Bevans (2002) relevan. Pertanyaan teologisnya tidak berhenti pada apakah sebuah unsur budaya “boleh” atau “tidak boleh,” tetapi juga bagaimana makna budaya tersebut dipahami, diuji, dan bila memungkinkan ditransformasikan dalam konteks iman.

Mangulosi dan Pergeseran Makna Ulos

Wilayah kontradiksi kedua adalah *mangulosi*. Data penelitian menjelaskan bahwa Ulos Holong dalam praktik adat dipahami sebagai simbol pemberkatan, perlindungan, dan ikatan kasih dalam struktur kekerabatan. Sikap GKII bukan semata-mata meniadakan seluruh penggunaan ulos, tetapi menolak penggunaan yang ditafsirkan memberikan tuah atau kekuatan spiritual kepada kain tersebut. Dalam bentuk yang dapat diterima gereja, ulos mengalami pembatasan makna menjadi simbol kasih atau benda budaya. Fenomena tersebut memperlihatkan proses desakralisasi sekaligus reinterpretasi. Objek fisiknya dapat dipertahankan, tetapi sistem makna yang menyertainya diubah. Ulos tidak lagi ditempatkan sebagai medium berkat yang memiliki kekuatan intrinsik, melainkan sebagai simbol relasi kekerabatan.

Hal ini menarik karena menunjukkan bahwa perubahan agama tidak selalu menghilangkan artefak budaya. Yang dapat berubah justru semiotika budaya, cara suatu objek ditafsirkan. Hefner (1993) menunjukkan bahwa konversi dan perubahan keagamaan dapat membawa reorganisasi mendalam terhadap orientasi moral dan simbolik suatu komunitas. Dalam kasus ini, proses tersebut terlihat pada perubahan pertanyaan dari “apakah ulos digunakan?” menjadi “makna apa yang diberikan kepada ulos ketika digunakan?” Karena itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa negosiasi antara Kekristenan dan adat dapat berlangsung pada tingkat pemaknaan. Temuan tersebut juga membuka ruang dialog karena tidak seluruh bentuk *mangulosi* harus diperlakukan sebagai praktik yang identik apabila makna, ucapan, dan tujuan penggunaannya berbeda.

Penghormatan terhadap Jenazah dan Batas Teologis GKII

Kontradiksi yang paling tegas ditemukan pada praktik yang dalam data penelitian dikategorikan sebagai penghormatan kepada jenazah, terutama *piring sai* dan *minta tua*. Naskah penelitian menyatakan bahwa GKII menolak komunikasi, doa, atau permohonan

berkat yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal. Penolakan tersebut didasarkan pada pemahaman gereja mengenai doa dan keselamatan. Pendeta GKII yang diwawancarai menegaskan bahwa gereja tidak bermaksud membenci budaya Batak, tetapi menolak praktik yang menurut interpretasi gereja mengarah pada penyembahan atau komunikasi dengan roh serta permohonan berkat kepada orang meninggal. Sebaliknya, *Raja Parhata* yang diwawancarai memandang adat kematian sebagai bentuk penghormatan terakhir dan pelaksanaan *Dalihan Na Tolu*, bukan penyembahan berhala.

Dua pandangan tersebut memperlihatkan pusat persoalan penelitian secara sangat jelas. Kedua pihak tidak hanya berbeda dalam praktik, tetapi juga dalam mendefinisikan praktik tersebut. Apa yang oleh satu pihak dikategorikan sebagai ekspresi penghormatan dan kekerabatan dapat dibaca pihak lain sebagai tindakan yang memasuki wilayah spiritual yang tidak kompatibel dengan doktrin gereja. Karena itu, istilah “sinkretisme”, “pagan”, atau “pemujaan leluhur” perlu digunakan secara hati-hati dalam artikel. Istilah tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai kategori emik atau interpretasi pihak gereja, bukan otomatis sebagai deskripsi objektif seluruh makna adat Batak Toba. Pendekatan demikian membuat analisis lebih akademis dan menghindarkan penelitian dari penghakiman teologis terhadap komunitas yang sedang diteliti.

Implikasi sosial pertama adalah munculnya dilema loyalitas. Jemaat GKII berada sekaligus dalam dua sistem keanggotaan: komunitas iman dan komunitas kekerabatan. Ketika keluarga menyelenggarakan upacara kematian, seorang jemaat dapat menghadapi tuntutan untuk mematuhi ketentuan gereja sekaligus memenuhi kewajiban adat sebagai anggota marga. Hasil penelitian menggambarkan situasi ini sebagai *double bind*. Penolakan terhadap praktik adat tertentu berpotensi menimbulkan ketegangan dengan keluarga besar, sedangkan keterlibatan dalam ritual yang dilarang gereja dapat menimbulkan persoalan dengan komunitas keagamaan. Ketegangan juga ditemukan antara generasi tua yang mempertahankan adat dengan sebagian generasi yang lebih mengikuti ketentuan gereja. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa identitas keagamaan dan identitas budaya tidak selalu dapat dipisahkan secara sederhana. Seseorang dapat sekaligus menjadi orang Kristen yang memiliki komitmen kuat terhadap gerejanya dan orang Batak yang terikat oleh marga serta *Dalihan Na Tolu*. Ketika norma kedua komunitas tidak sejalan, individu harus melakukan negosiasi identitas. Dalam kerangka Berger (1967), agama menyediakan struktur makna yang membantu individu menafsirkan dunia. Namun, struktur makna keagamaan tersebut bertemu dengan struktur legitimasi sosial yang telah dibentuk oleh adat. Karena itu, perubahan keyakinan terhadap ritual tertentu dapat menghasilkan perubahan dalam hubungan sosial yang sebelumnya ditopang oleh konsensus budaya.

Penurunan Partisipasi Komunal dan Munculnya Jarak Sosial

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa pembatasan keterlibatan dalam beberapa prosesi adat berdampak pada partisipasi sosial. Naskah mencatat adanya penarikan diri sebagian jemaat dari arena tertentu dalam upacara kematian masyarakat non-GKII. Kondisi tersebut berhubungan dengan menurunnya intensitas *marsiadapari* dan munculnya persepsi dari sebagian komunitas adat bahwa GKII bersikap eksklusif atau

“anti-budaya.” Implikasi tersebut penting karena dalam masyarakat dengan struktur kekerabatan kuat, kehadiran pada upacara kematian mempunyai fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar mengikuti ritual. Kehadiran dapat merupakan ekspresi solidaritas, penghormatan, pertukaran kewajiban sosial, dan pemeliharaan hubungan antarkeluarga. Temuan ini dapat dibaca melalui Durkheim (1912), yang melihat ritual sebagai mekanisme penting pembentukan solidaritas. Ketika suatu komunitas tidak lagi berpartisipasi dalam ritual bersama, bukan hanya praktik ritual yang berubah, tetapi juga kesempatan untuk memproduksi dan memperbarui solidaritas kolektif. Namun demikian, data penelitian tidak menunjukkan bahwa seluruh hubungan sosial jemaat dengan masyarakat terputus. Karena itu, istilah yang lebih proporsional adalah pergeseran atau pelemahan pada bidang-bidang interaksi tertentu, bukan kehancuran total solidaritas masyarakat.

Pada dimensi budaya, penelitian menemukan bahwa pembatasan keterlibatan dalam ritual tertentu berdampak pada transmisi pengetahuan budaya kepada generasi berikutnya. Naskah menyebut berkurangnya pemahaman sebagian generasi muda mengenai filosofi Dalihan Na Tolu, istilah adat, dan tata cara kekerabatan sebagai bentuk erosi atau dekulturasi. Temuan tersebut dapat dipahami karena pengetahuan budaya tidak hanya diwariskan melalui pengajaran verbal. Banyak pengetahuan adat bersifat praktis dan performatif: seseorang mempelajari posisi *hula-hula*, *boru*, dan *dongan tubu* dengan hadir, mengamati, dan menjalankan perannya dalam peristiwa adat. Ketika partisipasi berkurang, kesempatan memperoleh pengetahuan melalui pengalaman juga ikut berkurang. Meskipun demikian, istilah “dekulturasi” perlu digunakan secara terbatas. Data penelitian lebih kuat mendukung adanya pelemahan transmisi unsur adat tertentu, bukan hilangnya keseluruhan identitas Batak dari jemaat GKII. Perbedaan tersebut penting agar kesimpulan artikel tidak melampaui data empiris.

Temuan yang sangat penting justru muncul pada proses reinterpretasi dan adaptasi budaya. Data menunjukkan bahwa sebagian jemaat dan tokoh adat mulai membangun kompromi. Dalam bentuk tersebut, gondang dapat digantikan dengan musik rohani instrumental, sementara pemberian ulos tetap dilakukan tetapi ucapan atau *hata pasu-pasu* adat yang dipersoalkan digantikan dengan doa Kristen. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan gereja dan adat tidak berhenti pada pola *acceptance versus rejection*. Di antara keduanya terdapat ruang ketiga berupa *reinterpretation*. Pola tersebut dekat dengan gagasan Bevans (2002) mengenai teologi kontekstual. Kebudayaan tidak diterima tanpa kritik, tetapi juga tidak selalu harus dimusnahkan. Unsur budaya dapat ditafsirkan kembali dalam dialog dengan iman. Pendekatan semacam ini memungkinkan gereja mempertahankan batas teologisnya tanpa harus memutus keseluruhan hubungan jemaat dengan warisan budaya.

Temuan penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif Max Weber. Weber (1922/1978) membedakan beberapa bentuk legitimasi otoritas, termasuk otoritas tradisional dan karismatik. Dalam konteks Parparean, Raja Parhata memperoleh legitimasi terutama melalui struktur adat dan tradisi, sedangkan pimpinan gereja memperoleh legitimasi religius dari posisi kepemimpinan serta pengakuan jemaat terhadap otoritas rohaninya. Hasil penelitian menafsirkan kuatnya kepatuhan jemaat kepada pimpinan GKII sebagai manifestasi dominasi otoritas karismatik. Otoritas tersebut

dapat menggeser pengaruh otoritas tradisional ketika keduanya memberikan tuntutan normatif yang berbeda. Namun, temuan ini perlu dibaca secara hati-hati. Data penelitian mendukung adanya pengaruh kuat pimpinan gereja, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kepatuhan jemaat semata-mata merupakan kepatuhan personal terhadap figur pendeta. Kepatuhan juga dapat berasal dari keyakinan jemaat terhadap Alkitab, doktrin, dan identitas komunitas GKII. Dengan demikian, otoritas yang bekerja kemungkinan merupakan kombinasi antara otoritas figur kepemimpinan dan otoritas sistem keyakinan yang dilembagakan. Pembacaan tersebut membuat penggunaan Weber lebih presisi: yang terjadi bukan sekadar “pendeta mengalahkan Raja Parhata,” tetapi kompetisi sumber legitimasi normatif. Ketika terjadi konflik aturan, jemaat harus menentukan sumber otoritas mana yang memiliki legitimasi tertinggi dalam keputusan religiusnya.

Perspektif Émile Durkheim (1912) membantu menjelaskan implikasi yang lebih luas. Menurut Durkheim, kehidupan keagamaan membentuk perbedaan antara *sacred* dan *profane*, sedangkan ritual memperkuat solidaritas komunitas moral. Dalam kasus GKII Parparean, penelitian menunjukkan adanya proses rekonstruksi batas sakral. Praktik yang dalam sistem adat memiliki nilai simbolik atau sakral dapat dikategorikan kembali oleh komunitas gereja sebagai praktik yang tidak memiliki legitimasi spiritual atau bahkan dianggap berisiko terhadap kemurnian iman. Sebaliknya, doa Kristen, firman, lagu rohani, dan praktik gerejawi ditempatkan sebagai bentuk yang memperoleh legitimasi sakral. Perubahan tersebut menghasilkan paradoks sosial. Pada satu sisi, identitas dan solidaritas internal jemaat dapat menjadi lebih kuat karena anggota memiliki batas keyakinan yang jelas. Pada sisi lain, semakin tegas batas tersebut, semakin besar kemungkinan munculnya jarak dengan komunitas adat ketika ritual bersama merupakan salah satu mekanisme utama solidaritas sosial. Hasil penelitian melihat keadaan ini sebagai penguatan solidaritas internal sekaligus pelemahan kohesi dengan komunitas adat yang lebih luas. Akan tetapi, istilah Durkheimian “solidaritas mekanik” dan “solidaritas organik” sebaiknya tidak diterapkan terlalu literal. Konsep tersebut awalnya berkaitan dengan tipe integrasi masyarakat berdasarkan pembagian kerja, sehingga dalam artikel ini lebih aman menggunakan formulasi penguatan solidaritas intra-komunitas dan potensi pelemahan solidaritas lintas-komunitas.

Gereja dan otoritas adat memberikan interpretasi berbeda terhadap simbol tertentu. Pada tahap kedua, jemaat menghadapi konsekuensi sosial dari dua tuntutan normatif tersebut dan mencari kemungkinan kompromi. Pada tahap ketiga, beberapa bentuk budaya dipertahankan tetapi diberikan pemaknaan baru yang dinilai lebih sesuai dengan keyakinan Kristen. Temuan ini memperluas penelitian terdahulu tentang perubahan ritual kematian Batak Toba (Firmando, 2020; Hutagaol & Prayitno, 2019; Simbolon & Limbong, 2021; Sinulingga et al., 2023; Simangunsong et al., 2024). Kasus GKII Parparean memperlihatkan bahwa transformasi budaya tidak selalu berbentuk hilangnya tradisi. Perubahan dapat terjadi melalui seleksi, desakralisasi, substitusi, dan reinterpretasi simbol. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian terletak pada pemahaman bahwa kontradiksi gereja dan adat bukan semata-mata konflik antara “iman” dan “budaya,” melainkan kontestasi mengenai siapa yang berhak menentukan makna simbol, sumber otoritas mana yang dianggap paling legitimate, dan bagaimana solidaritas sosial

dipertahankan ketika sistem normatif agama dan adat tidak sepenuhnya berimpit. Data adaptasi yang ditemukan menunjukkan bahwa ruang dialog tetap tersedia. Tantangannya bukan menghapus identitas Kristen atau Batak, tetapi membangun mekanisme interpretasi yang memungkinkan jemaat mempertahankan integritas keyakinan sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial-kulturalnya secara konstruktif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontradiksi antara Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan adat kematian Batak Toba di Desa Parparean pada dasarnya merupakan persoalan perbedaan pemaknaan terhadap sejumlah praktik budaya, bukan penolakan gereja terhadap keseluruhan identitas budaya Batak Toba. GKII masih menerima unsur budaya yang dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, tetapi memberikan batas tegas terhadap praktik yang dipahami mengandung komunikasi dengan roh leluhur, permohonan berkat kepada orang yang telah meninggal, atau pemberian makna spiritual tertentu terhadap benda dan ritual. Perbedaan interpretasi tersebut terutama tampak pada penggunaan Gondang Sabangunan, tradisi mangulosi, serta praktik penghormatan terhadap jenazah. Kontradiksi tersebut tidak hanya berada pada ranah teologis, tetapi berimplikasi terhadap kehidupan sosial jemaat. Jemaat GKII berada dalam dua struktur yang sama-sama memiliki tuntutan normatif, yaitu komunitas gereja dan sistem kekerabatan Batak Toba. Ketika ketentuan keduanya berbeda, jemaat menghadapi dilema dalam mempertahankan ketaatan terhadap keyakinan gereja sekaligus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota keluarga dan marga. Dalam beberapa kasus, keadaan tersebut berpengaruh terhadap partisipasi dalam kegiatan adat, hubungan antargenerasi, praktik *marsiadapari*, dan intensitas hubungan dengan komunitas adat. Dengan demikian, perubahan pemahaman keagamaan terhadap ritual kematian memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas daripada sekadar perubahan tata cara upacara.

Pada dimensi budaya, penelitian menemukan adanya kecenderungan pelemahan transmisi unsur pengetahuan adat tertentu, khususnya ketika generasi muda semakin terbatas keterlibatannya dalam ritual yang selama ini menjadi arena pembelajaran Dalihan Na Tolu, tata hubungan kekerabatan, dan praktik adat. Namun, penelitian juga memperlihatkan bahwa perubahan tersebut tidak selalu berakhir pada penghilangan budaya. Muncul proses adaptasi dan reinterpretasi, misalnya penggunaan musik rohani sebagai pengganti gondang dalam konteks tertentu atau tetap digunakannya ulos dengan pemaknaan yang disesuaikan dengan keyakinan Kristen. Temuan ini memperlihatkan bahwa identitas keagamaan dan identitas budaya dapat dinegosiasikan melalui pemberian makna baru terhadap simbol dan praktik. Dari perspektif teoritis, temuan penelitian memperlihatkan adanya kompetisi legitimasi antara otoritas keagamaan dan otoritas tradisional. Otoritas pimpinan gereja dan doktrin keagamaan memberikan kerangka normatif bagi jemaat dalam menentukan praktik yang dapat atau tidak dapat diikuti, sementara Raja Parhata dan struktur adat memperoleh legitimasi dari tradisi dan sistem kekerabatan. Dalam perspektif Durkheim, pembentukan batas sakral yang semakin tegas dapat memperkuat solidaritas internal komunitas gereja, tetapi pada saat yang sama berpotensi menghasilkan jarak sosial dengan komunitas adat apabila ruang interaksi bersama semakin berkurang. Kontribusi utama penelitian ini adalah

menunjukkan bahwa persoalan gereja dan adat tidak cukup dijelaskan dengan dikotomi “iman versus budaya.” Persoalan yang lebih mendasar terletak pada perbedaan interpretasi simbol, kompetisi sumber otoritas, negosiasi identitas, dan perubahan pola solidaritas sosial. Oleh karena itu, dialog antara gereja, tokoh adat, dan jemaat menjadi penting untuk mengidentifikasi secara kritis unsur budaya yang benar-benar memiliki muatan teologis problematis dan membedakannya dari unsur yang terutama memiliki fungsi sosial, kekerabatan, dan identitas budaya. Melalui pendekatan demikian, integritas iman Kristen dapat dipertahankan tanpa harus meniadakan identitas Batak Toba, sementara adat dapat mengalami reinterpretasi yang memungkinkan keberlanjutannya dalam kehidupan masyarakat Kristen kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, A. (2004). *An introduction to Pentecostalism: Global charismatic Christianity*. Cambridge University Press.
- Berger, P. L. (1967). *The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion*. Doubleday.
- Bevans, S. B. (2002). *Models of contextual theology* (Rev. and expanded ed.). Orbis Books.
- Durkheim, E. (1912). *Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le système totémique en Australie*. Félix Alcan.
- Firmando, H. B. (2020). Perubahan sosial dalam upacara adat kematian pada etnis Batak Toba di Tapanuli Utara. *Sosial Budaya*, 17(2).
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Hefner, R. W. (Ed.). (1993). *Conversion to Christianity: Historical and anthropological perspectives on a great transformation*. University of California Press.
- Hollenweger, W. J. (1997). *Pentecostalism: Origins and developments worldwide*. Hendrickson Publishers.
- Hutagaol, R., & Prayitno, I. S. P. (2019). Perkembangan *Mangongkal Holi* Batak Toba dalam Kekristenan di Tanah Batak. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Niebuhr, H. R. (1951). *Christ and culture*. Harper & Brothers.

- Robbins, J. (2004). The globalization of Pentecostal and charismatic Christianity. *Annual Review of Anthropology*, 33, 117–143. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.061002.093421>
- Simangunsong, E., Manurung, R., & Saragih, A. (2024). Musical communication in Batak Toba death ceremonies: Cultural meaning and social identity. *International Journal of Cultural Studies*.
- Simbolon, E. T., & Limbong, H. (2021). Perawatan setelah kematian dalam budaya Batak Toba: Perspektif sosial dan budaya. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*.
- Sinulingga, J., Sibarani, R., Ganie, R., & Takari, M. (2023). The meaning of Ulos Saput in the death ceremony of Batak Toba community. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(1), 227–233.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.). Oxford University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.